



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi menuju terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, responsif dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti tertib, efisien, efektif dan terkendali sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dan tercipta akuntabilitas terhadap publik, maka pemerintah dituntut untuk berkomitmen dan mengoptimalkan membangun segenap komponen pemerintahan agar terwujud pola hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha dan pelayanan pada masyarakat yang merupakan domain utama pemerintahan sehingga akan menumbuhkan aktivitas usaha yang lebih baik dan maju.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu memiliki program dan kegiatan yang mencerminkan upaya tersebut.

Kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 sebagaimana telah Menjadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2023;
- Neraca Per 31 Desember 2023;
- Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-

undangan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

- b. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- c. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat.
- d. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- e. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- f. Mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas ;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

- e. Menyediakan informasi mengenai cara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

---

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan Negara.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i) Keputusan Bupati Nomor 900.1.3/Kpts.3Huk/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- k) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

- l) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.
- m) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- n) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- o) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- p) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- r) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- s) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd
- 2.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 3.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 3.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
  - 3.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
  - 3.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
  - 4.1 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Pendapatan Daerah
  - 4.2 Unsur Organisasi Pelaksana Badan Pendapatan Daerah
  - 4.3. Kepegawaian
- Bab V Penutup



## BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adapun realisasi 2 (dua) Program dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan	Kinerja Keuangan %
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.416.450	14.347.600	99,52%
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	100%
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.400.000	3.000.000	88,24%
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000	6.500.000	100%
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	880.000	880.000	100%
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000	100%
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.857.500	17.857.500	100%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.416.133.460	8.814.348.635	93,61%
9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.250.000	7.644.000	92%
10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.390.000	4.390.000	100%
11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.390.000	3.590.000	81,78%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
12 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	74.900.000	99,87%
13 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0%

14	Sosialisasi Peraturan Undangan	Perundang	Perundang	17.602.500	17.375.000	98,71%
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			71.774.100	71.370.825	99,44%
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			161.643.000	158.079.150	97,8%
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			115.655.000	115.655.000	100%
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			506.593.500	102.416.800	20,22%
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			120.736.000	118.500.000	98,15%
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			394.461.825	393.790.000	99,83%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			182.033.200	181.254.000	99,57%
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			98.174.900	97.683.800	99,5%
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			440.476.750	375.582.999	85,27%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			394.285.000	384.384.171	97,49%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.982.650.000	1.980.899.400	99,91%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.650.000	210.382.780	99,87%
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			19.800.000	11.990.300	60,56%
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			317.100.000	315.417.724	99,47%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			424.037.000	417.650.000	98,49%
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			260.150.000	258.384.908	99,32%
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>						
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>						
32	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			127.865.000	127.580.000	99,78%
33	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			199.425.200	197.425.200	99%
34	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			185.652.800	182.652.800	98,38%
35	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			596.568.200	595.596.900	99,84%
36	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			292.196.000	290.196.000	99,32%
37	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			684.132.000	681.180.000	99,57%



38	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	167.778.000	167.441.174	99,8%
39	Penetapan Wajib Pajak Daerah	200.135.000	196.134.700	98%
40	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	299.012.000	298.060.000	99,68%
41	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	140.572.500	140.172.500	99,72%
42	Penagihan Pajak Daerah	2.829.712.738	2.819.267.857	99,63%
43	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	52.932.500	52.372.000	98,94%
44	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	148.449.000	144.656.000	97,44%
45	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	114.118.900	113.409.900	99,38%
<b>Total</b>		<b>21.319.690.023</b>	<b>20.176.519.623</b>	<b>94,64%</b>

## 2.2. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Tabel 2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

### 2.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tabel 3 Hambatan dan Kendala

Kode Kegiatan/ Rekening	Program/Kegiatan	%	Keterangan
<b>BELANJA</b>			
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Dikarenakan ada efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan bimbingan teknis tidak dilaksanakan.
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Dikarenakan ada efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tidak dilaksanakan.
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,22	Ketidak tersediaannya anggaran karena adanya defisit yang menyebabkan kegagalan pembayaran sehingga dilakukan kembali penganggaran pada Tahun Anggaran 2024.
<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.01.09	Pajak Reklame	87,66	Tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya penurunan pemakaian objek pajak reklame karena tempat pemasangan diisi dengan reklame bermuatan partai politik yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan hal itu dikecualikan untuk dipungut pajak.
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	98,87	Tidak tercapainya target disebabkan karena program peningkatan KWH tidak berjalan sesuai dengan target, sehingga penggunaan listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan, tentu hal ini menyebabkan peningkatan dalam pajak penerangan jalan yang atas penggunaan/pemakaian Listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan.

4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	96,50	Tidak tercapainya target disebabkan karena banyaknya desa melakukan rotasi pegawai dan atau pergantian pemungut di tingkat dusun, menyebabkan para pemungut tersebut banyak mengalami kesulitan dalam menemukan wajib pajak dalam pendistribusian SPPT ataupun dalam pemungutannya. Terbatasnya jumlah pegawai desa dibarengi dengan penambahan pekerjaan seperti PTSL dan persiapan PEMILU menyebabkan berkurangnya fokus dan waktu dalam pemungutan pajak PBB
-----------	---	-------	---



### **BAB III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Neraca Laporan Keuangan Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2023. Neraca Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp20.298.142.504,16 atau naik dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Nilai Aset sebesar Rp20.298.142.504,16 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp11.851.175.459,40. Aset Tetap sebesar Rp8.446.967.044,76. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.915.918.128,84. Ekuitas sebesar Rp18.382.224.375,32 sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp20.298.142.504,16 Naik dibanding dengan posisi per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, diketahui bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp79.592.730.089,00 atau mencapai 100,24% dari target anggaran Tahun 2023 sebesar Rp79.401.445.283,00. Sedangkan realisasi Belanja daerah sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp20.176.519.623,00 atau mencapai 94,64% dari target anggaran sebesar Rp21.319.690.023,00. Dari sisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada Tahun 2023 terdapat selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau surplus sebesar Rp59.416.210.466,00.

Berdasarkan Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus Operasional Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 (Un-Audited) ditutup dengan nilai sebesar Rp58.461.907.966,06 terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp81.438.039.813,16 sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp22.976.131.847,10 sehingga terdapat Surplus dari kegiatan operasional senilai Rp58.461.907.966,06.

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pendapatan Daerah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah Ekuitas awal sebesar Rp0,00 ditambah RK PPKD Uang sebesar (Rp59.416.210.466,00) ditambah RK PPKD Barang sebesar Rp8.295.077.500,76 ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp11.041.449.374,50 ditambah dengan Surplus LO sebesar Rp58.461.907.966,06 sehingga ekuitas akhir Tahun 2023 senilai Rp18.382.224.375,32.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

### 3.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
4.1.01	Pajak Daerah	79.304.003.983,00	79.231.480.089,00	99,91	0
4.1.02	Retribusi Daerah	97.441.300,00	361.250.000,00	370,74	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.401.445.283,00</b>	<b>79.592.730.089,00</b>	<b>100,24</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD Tahun 2023 sebesar Rp79.592.730.089,00 atau mencapai 100,24% dari pagu anggaran sebesar Rp79.401.445.283,00. Terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp79.231.480.089,00 dan Retribusi Daerah sebesar Rp361.250.000,00.

#### 3.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp79.231.480.089,00 atau mencapai 99,91% dari target sebesar Rp79.304.003.983,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>4.1.01.</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>79.304.003.983,00</b>	<b>79.231.480.089,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>
4.1.01.06	Pajak Hotel	646.101.900,00	665.700.103,00	103,03	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.284.354.508,00	6.459.192.020,00	102,78	0
4.1.01.08	Pajak Hiburan	111.369.250,00	121.626.765,00	109,21	0
4.1.01.08	Pajak Reklame	2.022.940.437,00	1.773.315.043,00	87,66	0

*Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023*

4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	38.943.468.000,00	38.502.756.436,00	98,87	0
4.1.01.11	Pajak Parkir	111.088.200,00	142.603.700,00	128,37	0
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	114.371.688,00	118.803.981,00	103,88	0
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.675.000,00	1.675.000,00	100	0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23.568.635.000,00	22.743.053.021,00	96,5	0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000,00	8.702.754.020,00	116,04	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.304.003.983,00</b>	<b>79.231.480.089,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>

Terdapat penerimaan pajak yang kurang optimal, Realisasi Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Kurang optimalnya pendapatan Pajak Reklame disebabkan oleh adanya penurunan pemakaian objek pajak reklame karena tempat pemasangan diisi dengan reklame bermuatan partai politik yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan hal itu dikecualikan untuk dipungut pajak. Pajak Penerangan Jalan tidak tercapainya target disebabkan karena program peningkatan KWH tidak berjalan sesuai dengan target, sehingga penggunaan listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan, tentu hal ini menyebabkan peningkatan dalam Pajak Penerangan Jalan yang atas penggunaan/pemakaian listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan karena banyaknya desa melakukan rotasi pegawai dan atau pergantian pemungut ditingkat dusun, menyebabkan para pemungut tersebut banyak mengalami kesulitan dalam menemukan wajib pajak dalam pendistribusian SPPT ataupun dalam pemungutannya.

### 3.1.1.2. Retribusi Daerah

Tabel 6 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
4.1.02.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>97.441.300,00</b>	<b>361.250.000,00</b>	<b>370,74</b>	<b>0,00</b>
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	97.441.300,00	361.250.000,00	370,74	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>97.441.300,00</b>	<b>361.250.000,00</b>	<b>370,74</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp361.250.000,00 atau 370,74% dari pagu anggaran sebesar Rp97.441.300,00. Retribusi Jasa Usaha ini merupakan Retribusi Pemakaian Ruangan (*Islamic Centre*) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

### 3.1.2. Belanja

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dapat diuraikan pada table sebagai berikut :

Tabel 7 Realisasi Belanja Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5.	<b>Belanja Daerah</b>				
5.1.	Belanja Operasi	20.669.005.073,00	19.592.083.124,00	94,79	0
5.1.	Belanja Modal	650.684.950,00	584.436.499,00	89,82	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.319.690.023,00</b>	<b>20.176.519.623,00</b>	<b>94,64</b>	<b>0</b>



Realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.176.519.623,00 atau mencapai 94,64% dari target anggaran sebesar Rp21.319.690.023,00.

### 3.1.2.1. Belanja Operasi

Tabel 8 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
5.1.01	Belanja Pegawai	9.445.153.460,00	8.843.368.635,00	93,63	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.223.851.613,00	10.748.714.489,00	95,77	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.669.005.073,00</b>	<b>19.592.083.124,00</b>	<b>94,79</b>	<b>0</b>

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.592.083.124,00 atau mencapai 94,79% dari pagu anggaran sebesar Rp24.450.023.656,00. Nilai realisasi Belanja Operasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai Rp8.843.368.635,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.748.714.489,00.

#### 3.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.843.368.635,00 atau mencapai 93,63% dari pagu anggaran sebesar Rp9.445.153.460,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.045.217.221,00	2.959.630.218,00	97,19	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.206.712.122,00	2.690.514.300,00	83,9	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	3.193.224.117,00	3.193.224.117,00	100	0

Objektif Lainnya ASN					
<b>JUMLAH</b>	<b>9.445.153.460,00</b>	<b>8.843.368.635,00</b>	<b>93,63</b>	<b>0</b>	

### 3.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.748.714.489,00 atau 95,77% dari pagu anggaran sebesar Rp11.223.851.613,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
5.1.02.01	Belanja Barang	2.397.873.350,00	1.988.326.065,00	82,92	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.491.003.938,00	4.441.809.928,00	98,9	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	945.962.000,00	937.951.822,00	99,15	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.115.352.325,00	1.107.986.674,00	99,34	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.273.660.000,00	2.272.640.000,00	99,96	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.223.851.613,00</b>	<b>10.748.714.489,00</b>	<b>95,77</b>	<b>0</b>

### 3.1.2.2. Belanja Modal

Tabel 11 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.186.750,00	345.304.756,00	83,98	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.498.200,00	199.172.193,00	99,84	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	39.959.550,00	99,9	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>650.684.950,00</b>	<b>584.436.499,00</b>	<b>89,82</b>	<b>0</b>

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp584.436.499,00 atau 89,82% dari pagu anggaran sebesar Rp650.684.950,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp345.304.756,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.172.193,00; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.959.550,00.

Tabel 12 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Rek.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 (Rp)
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>				
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>411.186.750,00</b>	<b>345.304.756,00</b>	<b>83,98</b>	<b>0</b>
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	26.691.750,00	16.033.950,00	60,07	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	272.896.000,00	229.253.307,00	84,01	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	111.599.000,00	100.017.499,00	89,62	0
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>199.498.200,00</b>	<b>199.172.193,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0</b>
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.498.200,00	199.172.193,00	99,84	0
<b>5.2.05.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.959.550,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	40.000.000,00	39.959.550,00	99,9	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>650.684.950,00</b>	<b>584.436.499,00</b>	<b>89,82</b>	<b>0</b>

### 3.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

3.2.1. Aset		
	Tahun 2023	Tahun 2022
3.2.1.1. Aset Lancar	Rp11.851.175.459,40	Rp0,00

Nilai saldo Aset Tahun 2023 adalah sebesar Rp20.298.142.504,16 sedangkan nilai saldo Aset Lancar Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.851.175.459,40 atau mengalami Kenaikan Nilai saldo Aset Lancar Tahun 2022 terdiri dari saldo Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.1.1. Kas</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Kas sebesar Rp0,00 terdiri dari saldo kas di Bendahara Penerimaan dan saldo kas di Bendahara Pengeluaran.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>a. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 nihil atau tidak terdapat saldo kas, berdasarkan hasil pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>b. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 nihil atau tidak terdapat saldo kas, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan kas (*cash opname*) pada Bendahara Pengeluaran.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.1.2. Piutang</b>	<b>11.802.165.042,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Pajak</b>	<b>21.432.981.668,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>(9.630.816.626,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>11.802.165.042,40</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.432.981.668,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan berdasarkan hasil perhitungan antara besaran yang telah ditetapkan dalam SKPD dengan pelunasan yang telah dilaksanakan dalam tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023

NO.	URAIAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI TAHUN 2023		SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
			TOTAL PENAMBAHAN	TOTAL PENGURANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Piutang Pajak Daerah	-	81.738.255.077,00	(79.255.583.191,50)	21.432.981.668,40	(9.630.816.626,00)	11.802.165.042,40
1.	Piutang Pajak Hotel	-	637.920.533,00	(676.840.103,00)	18.159.089,00	(90.795,00)	18.068.294,00
2.	Piutang Pajak Restoran	-	6.493.858.288,00	(6.471.335.770,00)	201.708.882,00	(19.477.577,60)	182.231.304,40
3.	Piutang Pajak Hiburan	-	124.233.015,00	(121.726.759,50)	2.706.250,00	(13.531,00)	2.692.719,00
4.	Piutang Pajak Reklame	-	1.860.108.103,00	(1.773.315.043,00)	764.197.896,00	(366.225.242,00)	397.972.654,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	38.707.484.752,00	(38.502.756.436,00)	3.364.465.902,00	(16.822.330,00)	3.347.643.572,00
6.	Piutang Pajak Parkir	-	147.048.800,00	(142.683.698,00)	5.851.100,00	(38.756,00)	5.812.344,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	-	125.401.828,00	(119.419.209,00)	58.771.104,40	(27.987.787,40)	30.783.317,00
8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	1.675.000,00	(1.675.000,00)	-	-	-
9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-	-
10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	24.937.770.738,00	(22.743.077.153,00)	17.017.121.445,00	(9.200.160.607,00)	7.816.960.838,00
11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	8.702.754.020,00	(8.702.754.020,00)	-	-	-
	<b>JUMLAH TOTAL PIUTANG</b>	-	<b>81.738.255.077,00</b>	<b>(79.255.583.191,50)</b>	<b>21.432.981.668,40</b>	<b>(9.630.816.626,00)</b>	<b>11.802.165.042,40</b>

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 adalah sebesar (Rp9.630.816.626,00). Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2023 atas pos-pos Piutang Pajak berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>a.</b>	<b>Piutang Pajak Hotel</b>	<b>18.159.089,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Hotel</b>	<b>(90.795,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Hotel Netto</b>	<b>18.068.294,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.159.089,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan disebabkan karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) tahun 2023 sebesar Rp616.263.406,00 dan koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp67.595.786,00 sedangkan pelunasan untuk tahun 2023 sebesar Rp598.104.317,00 dan pelunasan untuk tahun lalu sebesar Rp67.595.786,00 sehingga masih terdapat saldo piutang sebesar Rp18.159.089,00 yang merupakan piutang pajak tahun 2023 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih. Pengakuan pendapatan Pajak Hotel didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>57.078.659,00</b>	-	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu karena adanya piutang yang belum dicatat karena	21.657.127,00	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang karena	(11.140.000,00)	-	
4.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>67.595.786,00</b>	-	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	616.263.406,00	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang	(598.104.317,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2022	(67.595.786,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2021	-	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2020	-	-	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017	-	-	
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2016	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>18.159.089,00</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(90.795,00)</b>	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>18.068.294,00</b>	-	

Penyisihan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp90.795,00) berasal dari saldo piutang yang jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp18.159.089,00 dimana piutang tersebut berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50%, dengan nilai penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp90.795,00), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak hotel tersebut adalah sebesar Rp18.068.294,00 dengan rincian perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2023	18.159.089,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	90.795,00	18.068.294,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2022	-	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	-	-
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2019- 2021	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	$\geq 2018$	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>18.159.089,00</b>				<b>90.795,00</b>	<b>18.068.294,00</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>b.</b>	<b>Piutang Pajak Restoran</b>	<b>201.708.882,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Restoran</b>	<b>(19.477.577,60)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Restoran Netto</b>	<b>182.231.304,40</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp201.708.882,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan disebabkan karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) tahun 2023 sebesar Rp6.447.341.319,30 dan koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp213.559.583,00 sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp6.336.288.663,00 untuk pelunasan tahun lalu sebesar Rp122.903.357,00 sehingga terdapat saldo piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp201.708.882,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>179.186.364,00</b>	-	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2022 karena adanya piutang yang belum tercatat	46.516.969,00	-	
3.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2021 karena adanya piutang yang belum tercatat	-	-	
4.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2018 disebabkan adanya piutang yang belum tercatat	-	-	
	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2020 disebabkan Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	(12.123.750,00)	-	
	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	(20.000,00)	-	
5.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2014 disebabkan adanya kelebihan pencatatan	-	-	
8.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>213.559.583,00</b>	-	
9.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	6.447.341.319,00	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun	(6.336.288.663,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	(122.903.357,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2021	-	-	
10.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2018	-	-	
11.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2017	-	-	
12.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2016	-	-	
13.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2014	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>201.708.882,00</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(19.477.577,60)</b>	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>182.231.304,40</b>	-	

Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar (Rp19.477.577,60) dikarenakan berasal dari saldo piutang tahun 2023 adalah sebesar



Rp111.052.656,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp555.263,00), piutang yang berumur lebih 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp76.919.976,00 sehingga termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp7.691.997,60), piutang yang berumur lebih 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp5.011.866,00 sehingga termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp2.505.933,00), dan saldo piutang diatas tahun 2018 termasuk kategori piutang macet dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp8.724.384,00). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Restoran tersebut sebesar (Rp19.477.577,60), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp182.231.304,40 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2023	111.052.656,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	555.263,00	110.497.393,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2022	76.919.976,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	7.691.997,60	69.227.978,40
3.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2019-2021	5.011.866,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	2.505.933,00	2.505.933,00
4.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	$\geq 2018$	8.724.384,00	$x \geq 5$	MACET	100%	8.724.384,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>201.708.882,00</b>				<b>19.477.577,60</b>	<b>182.231.304,40</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>c.</b>	<b>Piutang Pajak Hiburan</b>	<b>2.706.250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Hiburan</b>	<b>(13.531,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Hiburan Netto</b>	<b>2.692.719,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.706.250,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan disebabkan karena adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dalam tahun 2023 sebesar Rp124.133.015,00 dan koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp200.000,00 sedangkan pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut sebesar Rp121.626.765,00 sehingga masih terdapat saldo piutang sebesar Rp2.706.250,00 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>199.994,50</b>	-	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2022 yang belum tercatat tetapi ada pelunasan pada tahun 2023	100.000,00	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2022 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang (hasil rekon internal Bapenda yang menyatakan bahwa data tersebut merupakan double input, double ketetapan, sudah bayar, data salah, data uji coba aplikasi)	(99.994,50)	-	
4.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>200.000,00</b>	-	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	124.133.015,00	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(121.626.765,00)	-	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan tahun 2017	-	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan tahun 2016	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>2.706.250,00</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(13.531,00)</b>	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>2.692.719,00</b>	-	

Penyisihan piutang pajak parkir atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp13.531,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp2.706.250,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp13.531,00 dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp2.692.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2023	2.706.250,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	13.531,00	2.692.719,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2022	-	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	-	-
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2019-2021	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	$\geq 2018$	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.706.250,00</b>				<b>13.531,00</b>	<b>2.692.719,00</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
d.	<b>Piutang Pajak Reklame</b>	<b>764.197.896,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Reklame</b>	<b>(366.225.242,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Reklame Netto</b>	<b>397.972.654,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp764.197.896,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau terjadi kenaikan. Adanya tambahan pengakuan piutang pajak disebabkan adanya SKP tahun 2023 sebesar Rp1.857.530.703,00 dan koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp679.982.236,00 sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp1.746.312.634,00, dan sebesar Rp27.002.409,00 untuk pelunasan piutang tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat saldo piutang sebesar Rp764.197.896,00; yang terdiri dari saldo Piutang Pajak Reklame *Billboard* sebesar Rp725.697.588,00; reklame kain sebesar Rp33.015.933,00 dan reklame melekat/stiker sebesar Rp5.484.375,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>677.404.836,00</b>	-	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	2.577.400,00	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2021 disebabkan Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	-	-	
	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2020 disebabkan Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	-	-	
	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	-	-	
4.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2015	-	-	
3.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>679.982.236,00</b>	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1.857.530.703,00	-	
5.	Pengurangan pengakuan piutang karena adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan pada tahun berjalan	(1.746.312.634,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2022	(26.786.709,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2021	(215.700,00)	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2020	-	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2019	-	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2018	-	-	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017	-	-	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2016	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>764.197.896,00</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(366.225.242,00)</b>	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>397.972.654,00</b>	-	

Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar (Rp366.225.242,00) berasal dari nilai total piutang sebesar Rp764.197.896,00. Saldo piutang yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sebesar Rp111.218.069,00 termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp556.090,00); saldo piutang yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun sebesar Rp205.475.785,00 termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp20.547.579,00); dan saldo piutang tahun 2021 s.d tahun 2019 sebesar Rp204.764.940,00 yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp102.382.471,00). Saldo piutang tahun 2018 sebesar Rp242.739.102,00 yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang macet dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp242.739.102,00). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Reklame tersebut sebesar (Rp215.654.399,00) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak reklame tersebut adalah sebesar Rp397.972.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2023	111.218.069,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	556.090,00	110.661.979,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2022	205.475.785,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	20.547.579,00	184.928.206,00
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2021	60.808.459,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	30.404.230,00	30.404.229,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2020	40.707.259,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	20.353.630,00	20.353.629,00
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2019	103.249.222,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	51.624.611,00	51.624.611,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	$\geq 2018$	242.739.102,00	$2 \leq x < 5$	MACET	100%	242.739.102,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>764.197.896,00</b>				<b>366.225.242,00</b>	<b>397.972.654,00</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
e.	<b>Piutang Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>3.364.465.902,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>(16.822.330,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Penerangan Jalan Netto</b>	<b>3.347.643.572,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.364.465.902,00 sedangkan saldo piutang per 31 Desember 2022 adalah

*Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023*

sebesar Rp0,00 atau naik disebabkan adanya ketetapan Pajak Penerangan Jalan tahun 2023 sebesar Rp38.707.484.752,00 dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp35.343.018.850,00 dan pembayaran tahun lalu sebesar Rp3.159.737.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>3.159.737.586,00</b>	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>3.159.737.586,00</b>	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	38.707.484.752,00	-	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(35.343.018.850,00)	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	(3.159.737.586,00)	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>3.364.465.902,00</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.822.330,00)	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>3.347.643.572,00</b>	-	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp16.822.330,00) berasal dari saldo piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.364.465.902,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp16.822.330,00) sehingga diperoleh nilai bersih piutang sebesar Rp3.347.643.572,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	2023	3.364.465.902,00	x < 1	LANCAR	0,50%	16.822.330,00	3.347.643.572
	<b>JUMLAH</b>		<b>3.364.465.902,00</b>				<b>16.822.330,00</b>	<b>3.347.643.572</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>f.</b>	<b>Piutang Pajak Parkir</b>	<b>5.851.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Parkir</b>	<b>(38.756,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Parkir Netto</b>	<b>5.812.344,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.851.100,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau naik disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dalam tahun 2023 sebesar Rp146.988.800,00 dan koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp1.466.000,00 dan terdapat pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut sebesar Rp141.237.700,00, sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.366.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>1.485.998,00</b>	-	
2.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang/Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	(79.998,00)	-	
	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2020 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang	-	-	
	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2021 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang	-	-	
3.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun 2022	60.000,00	-	
4.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun 2012	-	-	
3.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>1.466.000,00</b>	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	146.988.800,00	-	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(141.237.700,00)	-	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	-	-	
7.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2022	(1.366.000,00)	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>5.851.100,00</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(38.756,00)</b>	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>5.812.344,00</b>	-	

Penyisihan piutang pajak parkir atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp38.756,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp5.751.100,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp28.756,00), piutang kurang lancar tahun 2022

sebesar Rp100.000,00 dengan prosentase penyisihan sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp10.000,00) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp5.812.344 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2023	5.751.100,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	28.756,00	5.722.344
2	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2022	100.000,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	10.000,00	90.000
3	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2019-2021	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	$\geq 2018$	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>5.851.100,00</b>				<b>38.756,00</b>	<b>5.812.344</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>g.</b>	<b>Piutang Pajak Air Tanah</b>	<b>58.771.104,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah</b>	<b>(27.987.787,40)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Air Tanah Netto</b>	<b>30.783.317,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.771.104,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau naik disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2023 sebesar Rp124.653.043,00, dan koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp52.922.042,40 sedangkan pelunasan tahun berjalan sebesar Rp114.513.546,00; pelunasan atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp4.290.435,00. Dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak air tanah tersebut sebesar (Rp27.987.787,40) sehingga diperoleh nilai sisa piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.783.317,00 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>52.788.485,40</b>	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	748.785,00	-	
3.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu padahal sudah lunas pembayarannya	(615.228,00)	-	
4.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>52.922.042,40</b>	-	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	124.653.043,00	-	
	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2023	(114.513.546,00)	-	
	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2022	(4.290.435,00)	-	
	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2021	-	-	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2020	-	-	
	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2019	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>58.771.104,40</b>	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(27.987.787,40)</b>	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>30.783.317,00</b>	-	

Penyisihan piutang pajak air tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp27.987.787,40) berdasarkan perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp10.139.497,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp50.697,00); saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp17.465.890,00 yang berumur dibawah 2 (dua) tahun dikategorikan piutang kurang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 10% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp1.746.589,00); saldo piutang tahun 2021 sebesar Rp244.944,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp122.472,00), saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp1.797.768,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp898.884,00), saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp7.907.720,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp3.953.860,00) serta saldo piutang tahun 2018 sebesar Rp21.215.285,40 yang berumur diatas 5 (lima) tahun dengan kategori piutang macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp21.215.285,40) . Dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp30.783.317,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2023	10.139.497,00	x < 1	LANCAR	0,50%	50.697,00	10.088.800
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2022	17.465.890,00	1 ≤ x < 2	KURANG LANCAR	10%	1.746.589,00	15.719.301
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2021	244.944,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	122.472,00	122.472
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2020	1.797.768,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	898.884,00	898.884
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2019	7.907.720,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	3.953.860,00	3.953.860
		≥2018	21.215.285,40	x ≥ 5	MACET	100%	21.215.285,40	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>58.771.104,40</b>				<b>27.987.787,40</b>	<b>30.783.317,00</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>h.</b>	<b>Piutang Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang Pajak Sarang Burung Walet Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena nilai pajak sarang burung Walet yang ditetapkan pada tahun 2023 maupun tahun 2022 telah lunas dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1.675.000,00	-	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(1.675.000,00)	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	-	-	

Penyisihan piutang pajak burung wallet per 31 Desember 2023 maupun per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

		Tahun 2023	Tahun 2022
i.	<b>Piutang PBB-P2</b>	<b>17.017.121.445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang PBB-P2</b>	<b>(9.200.160.607,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang PBB-P2 Netto</b>	<b>7.816.960.838,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.017.121.445,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau naik disebabkan adanya koreksi pengakuan atas saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp14.822.403.728,00 dan tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun 2023 sebesar Rp24.937.770.738,00 dan terdapat pelunasan atas PBB-P2 tahun berjalan sebesar Rp21.798.957.625,00. Sehingga masih terdapat nilai piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.017.121.445,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>14.822.427.860,00</b>	-	
2.	Saldo Piutang setelah koreksi tambahan pengakuan			
	Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	-	-	
	Perubahan Ketetapan	-	-	
	Koreksi Pengakuan karena ada pelunasan	(24.132,00)	-	
3.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>14.822.403.728,00</b>	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang berdasarkan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	24.937.770.738,00	-	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun lalu	(944.095.396,00)	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(21.798.957.625,00)	-	
7.	Pengurangan karena adanya pembatalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu	-	-	
8.	Pengurangan SKPD piutang tahun lalu koreksi	-	-	
9.	Koreksi Pembatalan karena ada pelunasan	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>17.017.121.445,00</b>	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(9.200.160.607,00)</b>	-	-
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>7.816.960.838,00</b>	-	-

Penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.200.160.607,00), merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang bervariasi mulai dari kurang 1 (satu) tahun sampai dengan lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang mulai dari kategori lancar, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.200.160.607,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable*

Value) piutang tersebut adalah sebesar Rp7.816.960.838,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang PBB-P2	2023	3.138.813.113,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	15.694.066,00	3.123.119.047,00
	Penyisihan Piutang PBB-P2	2022	2.059.389.885,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	205.938.989,00	1.853.450.896,00
	Penyisihan Piutang PBB-P2	2021	1.797.431.912,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	898.715.956,00	898.715.956,00
	Penyisihan Piutang PBB-P2	2020	2.433.778.569,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	1.216.889.285,00	1.216.889.284,00
	Penyisihan Piutang PBB-P2	2019	1.449.571.311,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	724.785.656,00	724.785.655,00
	Penyisihan Piutang PBB-P2	$\geq 2018$	6.138.136.655,00	$x \geq 5$	MACET	100%	6.138.136.655,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>17.017.121.445,00</b>				<b>9.200.160.607,00</b>	<b>7.816.960.838,00</b>

		Tahun 2023	Tahun 2022
<b>j.</b>	<b>Piutang BPHTB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang BPHTB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Piutang BPHTB Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau nihil sama dengan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan tidak adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun 2023 sebesar Rp8.702.754.020,00 dan terdapat pelunasan tahun berjalan sebesar Rp8.702.754.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	8.702.754.020,00	-	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(8.702.754.020,00)	-	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP dalam tahun lalu	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.1.3. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>Rp49.010.417,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo beban dibayar di Muka Tahun 2023 sebesar Rp49.010.417,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dimaksud adalah Sewa Gedung untuk penyimpanan arsip dan sewa kantor untuk kantor UPTD Banjarsari dan UPTD Panjalu. Rincian Belanja Dibayar Dimuka terlampir. Sewa gedung untuk penyimpanan arsip dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis belum memiliki Gedung Arsip.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.1.4. Persediaan</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Nilai Persediaan periode Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau nihil. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor dan Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Tidak ada perubahan nilai persediaan, rincian Persediaan terlampir dari laporan ini. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa barang untuk hadiah. Penggunaan persediaan berdasarkan FIFO (*first in first out*) yakni barang persediaan yang datang lebih awal digunakan lebih awal untuk menghindari kadaluwarsa (*expired*). Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Selengkapnya nilai persediaan disajikan dalam lampiran.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.2. Aset Tetap</b>	<b>Rp8.446.967.044,76</b>	<b>Rp0,00</b>

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.2.1. Tanah</b>	<b>Rp1.484.254.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Nilai aset tetap Tanah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.484.254.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp11.295.843.206,76</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(Rp10.140.458.365,00)</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin Netto</b>	<b>Rp1.155.384.841,76</b>	<b>Rp0,00</b>

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.295.843.206,76 dengan nilai penyusutan (Rp10.140.458.365,00).

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp6.803.902.487,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(Rp1.268.724.087,00)</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Gedung dan Bangunan Netto</b>	<b>Rp5.535.178.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.803.902.487,00 dengan nilai penyusutan sebesar (Rp1.268.724.087,00).

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp754.744.667,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>(Rp482.594.864,00)</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Netto</b>	<b>Rp272.149.803,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp754.744.667,00 00 dengan nilai penyusutan sebesar (Rp482.594.864,00).

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.3. Aset Lainnya</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau nihil sama dengan saldo per 31 Desember 2022. Aset Lainnya ini terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Rp395.630.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(Rp395.630.000,00)</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud Netto</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp395.630.000,00 dengan nilai amortisasi sebesar (Rp395.630.000,00).

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.1.3.2. Aset Lain-lain</b>	<b>Rp13.447.222,53</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Penyisihan Aset lain-Lain</b>	<b>(Rp13.447.222,53)</b>	<b>Rp0,00</b>
<b>Aset Lain-lain Netto</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.447.222,53 dengan nilai penyisihan sebesar (Rp13.447.222,53).

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.2. Kewajiban</b>	<b>Rp1.915.918.128,84</b>	<b>Rp0,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Adapun nilai kewajiban periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.915.918.128,84 yang mana kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.915.918.128,84.

Nilai kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.915.918.128,84 terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang jasa, utang belanja modal dan penerimaan diterima dimuka. Utang belanja pegawai sebesar Rp813.409.980,00 merupakan pembayaran tambahan penghasilan pegawai bulan November dan Desember 2023 dan insentif pajak daerah triwulan 4 yang belum dibayar. Utang belanja barang jasa sebesar Rp448.763.166,00 berupa utang listrik, air, internet beban bulan Desember 2023 dan utang belanja bahan cetak yang belum dibayar. Utang belanja modal sebesar

Rp63.940.000,00. Sedangkan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp589.804.982,84 karena pengakuan atas pendapatan diterima dimuka dari pajak reklame.

	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>3.2.3. Ekuitas</b>	<b>Rp18.382.224.375,32</b>	<b>Rp0,00</b>

Ekuitas periode 31 Desember 2023 sebesar Rp18.382.224.375,32. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### 3.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERSIONAL

#### 3.3.1. Pendapatan - LO

Tabel 13 Realisasi Pendapatan - LO

Rek.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
8.	Pendapatan - LO	81.438.039.813,16	0,00	81.438.039.813,16	100,00
8.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	81.438.039.813,16	0,00	81.438.039.813,16	100,00
8.1.1.	Pajak Daerah - LO	81.076.789.813,16	0,00	81.076.789.813,16	100,00
8.1.2.	Retribusi Daerah - LO	361.250.000,00	0,00	361.250.000,00	100,00

Pendapatan LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, diperoleh sebagai imbalan atas sesuatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan maupun pada saat direalisasi tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

#### 3.3.2. Beban – LO

Tabel 14 Realisasi Beban - LO

Rek.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
9.	Beban - LO	22.976.131.847,10	0,00	22.976.131.847,10	100,00
9.1.	Beban Operasional - LO	22.975.611.847,10	0,00	22.975.611.847,10	100,00
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	9.656.778.615,00	0,00	9.656.778.615,00	100,00
9.1.2.	Beban Persediaan - LO	2.383.416.915,00	0,00	2.383.416.915,00	100,00



9.1.3.	Beban Jasa - LO	6.715.611.827,00	0,00	6.715.611.827,00	100,00
9.1.4.	Beban Pemeliharaan - LO	937.951.822,00	0,00	937.951.822,00	100,00
9.1.5.	Beban Perjalanan Dinas - LO	1.107.986.674,00	0,00	1.107.986.674,00	100,00
9.1.10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	499.466.955,00	0,00	499.466.955,00	100,00
9.1.11.	Beban Penyisihan Piutang - LO	1.674.399.039,10	0,00	1.674.399.039,10	100,00
<b>9.3.</b>	<b>Beban Lain - Lain - LO</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00</b>
9.3.1.	Beban Penurunan Nilai - LO	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00

Realisasi Beban – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.976.131.847,10 terdiri dari realisasi beban pegawai sebesar Rp9.656.778.615,00, beban persediaan Rp2.383.416.915,00, beban jasa Rp6.715.611.827,00, beban pemeliharaan Rp937.951.822,00, beban perjalanan dinas Rp1.107.986.674,00, beban penyusutan dan amortisasi Rp499.466.955,00, beban penyisihan piutang Rp1.674.399.039,10, dan beban penurunan nilai Rp520.000,00 sehingga jumlah beban sebesar Rp22.976.131.847,10.

#### 3.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3.4.1. Ekuitas Awal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp0,00 merupakan ekuitas akhir dari periode akuntansi 31 Desember 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3.4.2. Surplus/Defisit LO</b>	<b>58.461.907.966,06</b>	<b>0,00</b>

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Surplus sebesar Rp58.461.907.966,06. Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih antara pendapatan-lo sebesar Rp81.438.039.813,16 dikurangi beban-lo sebesar Rp22.976.131.847,10.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3.4.3. Dampak Kumulatif</b>	<b>11.041.449.374,50</b>	<b>0,00</b>

Dampak Kumulatif merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan

dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu dan penyisihan piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Nilai Dampak Kumulatif untuk periode berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp11.041.449.374,50 terdiri dari dampak kumulatif dari penyisihan piutang sebesar (Rp7.956.417.586,90) serta dampak kumulatif piutang Rp18.997.866.961,40.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3.4.4. RK PPKD Uang</b>	<b>(59.416.210.466,00)</b>	<b>0,00</b>

Nilai RK PPKD Uang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp59.416.210.466,00) yang berasal dari jumlah SP2D yang diterima dikurangi dengan CP yang disetor ke Kas Daerah dan dikurangi dengan pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3.4.5. RK PPKD Barang</b>	<b>8.295.077.500,76</b>	<b>0,00</b>

RK PPKD Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.295.077.500,76 merupakan nilai mutasi aset masuk dan mutasi ke luar/ PPKD.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3.4.6. Ekuitas Akhir</b>	<b>18.382.224.375,32</b>	<b>0,00</b>

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.523.986.439,76 merupakan selisih dari ekuitas awal sebesar Rp0,00 ditambah RK PPKD Uang (Rp59.416.210.466,00) ditambah RK PPKD Barang Rp8.295.077.500,76 ditambah Surplus-LO Rp58.461.907.966,06 dan ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp11.041.449.374,50.



## **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

### **4.1. TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Badan Pendapatan Daerah berdiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **4.2. UNSUR ORGANISASI PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
  2. Sub Bidang Pelaporan dan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah;
  2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (PDRD) terdiri atas:
  1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
  2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan PDRD; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPT
  1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ciamis;
  2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Panjalu;
  3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kawali;
  4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Rancah;
  5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banjarsari; dan
  6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Cihaurbeuti.

#### **4.3. KEPEGAWAIAN**

---

Jumlah Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang, terdiri dari ASN Pria 35 (tiga puluh lima) orang dan ASN Wanita 9 (sembilan) orang. Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja adalah :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Kepala Badan                            | : 1 orang |
| 2. Sekretariat                             | : 6 orang |
| 3. Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan | : 7 orang |
| 4. Bidang Pelayanan dan Penetapan          | : 7 orang |
| 5. Bidang Penagihan dan Pengawasan         | : 8 orang |
| 6. UPTD Ciamis                             | : 4 orang |
| 7. UPTD Cihaurbeuti                        | : 3 orang |
| 8. UPTD Panjalu                            | : 2 orang |
| 9. UPTD Kawali                             | : 1 orang |
| 10. UPTD Banjarsari                        | : 3 orang |
| 11. UPTD Rancah                            | : 2 orang |

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan, adalah :

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| ▪ Golongan IV / c | : 1 orang |
| ▪ Golongan IV / a | : 2 orang |

- Golongan III / d : 15 orang
- Golongan III / c : 2 orang
- Golongan III / b : 10 orang
- Golongan III / a : 10 orang
- Golongan II / d : 4 orang



## **BAB V PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dibaca dengan mudah dan dipahami oleh pengguna laporan juga oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Februari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,**

Dr. AEF SAEFULOH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671110 199703 1 008

